



## NOTULA

### FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) SUSUNAN DAN TUGAS TENAGA AHLI LAYANAN USAHA JASA KONSULTANSI PERANCANGAN SEKTOR BINA MARGA

Hari, Tanggal : Jumat, 13 Januari 2023  
Waktu : 13.30 WIB – Selesai  
Tempat : *Video conference* melalui aplikasi Zoom  
Pimpinan Rapat : Kepala Subdirektorat Kontrak Konstruksi  
Peserta : Terlampir dalam surat undangan

#### A. Hasil Diskusi

No	Nama	Hasil Pembahasan Diskusi
1.	<b>Pak Yudha Sandyutama</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk paket paket di BP2JN umumnya menggunakan terminologi perencanaan teknis</li><li>- Biasanya konsultan menggunakan tenaga ahli freelance, akhirnya ketika ada perubahan desain, konsultan kesulitan memanggil tenaga ahlinya kembali, sehingga perlu penambahan klausul tanggung jawab perancang sampai dengan pekerjaan fisik selesai dilakukan (baik untuk konsultan perancangannya maupun tenaga ahlinya)</li><li>- Tenaga ahli geoteknik dan geologi berbeda, disiplinnya berbeda, geoteknik terkait tanah, geologi terkait batuan, dan ada 2 laporan yang dihasilkan, geoteknik menghasilkan laporan survei tanah, dan geologi menghasilkan laporan survey batuan</li></ul>
2.	<b>Bu Ellis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biasanya di Bina Marga ada Core Team: Perancangan dan Pengawasan. Jalur koordinasi Core Team bagaimana dengan konsultan perancang? Pak Yudha: Core team hanya menghasilkan output perencanaan sederhana Reviu desain tetap dilakukan oleh konsultan perencana</li><li>- Terminologi perlu merujuk ke undang – undang jasa konstruksi, yang kita kunci adalah aktivitas – aktivitas perancangan seperti apa saja dan outputnya, sehingga nanti ada fleksibilitas untuk unor-unor nantinya menyesuaikan dengan terminologi masing – masing</li><li>- Konstruksi khusus apa sebaiknya melebur di pembangunan jalan dan jembatan saja? Nanti ditambahkan tenaga ahli khusus untuk pembangunan terowongannya Pak Poltak:</li></ul>

No	Nama	Hasil Pembahasan Diskusi
		Menyarankan untuk dipisahkan berdasarkan jenis konstruksinya (1) jalan, (2) Jembatan, dan (3) Konstruksi khusus (seperti tunneling)
3.	<b>Pak Yudha Handita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Core team biasanya di supervisi, dan kadang pada pelaksanaan supervisi ada perubahan desain seperti jika desain tidak bisa dilaksanakannya, core team dapat merubah tanpa dapat izin konsultan perencana, sehingga tanggung jawab dialihkan kepada core team</li> </ul>
4.	<b>Pak Yulianto - Praktisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu disepakati bahwa tanggung jawab konsultan perancang sampai dengan masa konstruksi selesai (merujuk ke UUKJ)</li> <li>- Kontrak antara perusahaan dengan PPK, sehingga walaupun sewaktu waktu TL/TA tidak tetap yang susah dihubungi ataupun meninggal dll, maka perusahaan harus tetap bertanggung jawab karena kontraknya antara perusahaan dengan PPK</li> <li>- Biasanya tidak ada paket terowongan terpisah, umumnya masuk kedalam paket pembangunan jalan+jembatan+terowongan, jadi tidak perlu struktur tenaga ahli khusus, cukup dengan menambahkan ahli <i>tunnel engineer</i></li> </ul>
5.	<b>Bu Siti Mardiyah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilihat perancangan masuknya ke KBLI diklasifikasi dan subklasifikasi mana, karena ada perencanaan terpisah, dan perancangan terpisah (Terminologi perancangan masih belum clear)</li> </ul>
6.	<b>Pak Poltak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalau yang membutuhkan konstruksi khusus seperti terowongan masuk dimana? Perlu diakomodir juga karena pasti kebutuhannya berbeda dengan jalan dan jembatan Bu Nuraini: Permen PU KKTJT, tunnel terowongan masuk di konstruksi khusus selain jalan dan jembatan</li> <li>- Jangan sampai SE Dirjen yang akan diterbitkan di bina marga, kontradiksi dengan apa yang ada di SE Menteri PUPR Perancangan, sehingga perlu disinkronisasi</li> <li>- Seperti pemeliharaan jalan, apakah perlu suatu proses perancangan? Karena dalam pemeliharaan jalan biasanya hanya perhitungan volume</li> <li>- Nomenklatur preservasi sifatnya generik, padahal dalam preservasi ada lingkup yang berbeda beda yang membutuhkan keahlian khusus (output juga dapat berbeda), sehingga mungkin seharusnya yang muncul adalah lingkup yang lebih spesifik bukan generik.</li> <li>- Apabila ada pembangunan jalan yang membutuhkan pembangunan jembatan, maka dapat menambahkan TA yang terdapat pada lingkup pembangunan jembatan, sehingga nantinya tidak memerlukan untuk perizinan PTM.</li> <li>- Untuk alternatif lingkup struktur organisasi perancangan: Alternatif 1: dengan membuat bintang – bintang kondisional</li> </ul>

No	Nama	Hasil Pembahasan Diskusi
		<p>Alternatif 2: membuat lingkup dengan kombinasi – kombinasi (jalan + jembatan)</p> <p>Alternatif 3: lingkup hanya 4 (1) jalan, (2) jembatan, (3) terowongan, (4) kestabilan lereng namun ada catatan dapat mengambil TA di jembatan apabila dalam pembangunan jalan dibutuhkan juga TA jembatan, maka untuk mengambil dari lingkup lainnya butuh izin PTM (dan berisiko duplikasi oleh PPK)</p>
7.	<b>Bu Nuraini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bina marga punya pedoman penyusunan KAK Penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis jalan dan jembatan namun masih dalam proses sirkuler</li> <li>- Hanya membagi menjadi 2: jalan dan jembatan, untuk tenaga ahli yang dibutuhkan sama, yang biasanya membedakan adalah pembiayaannya saja, seringnya jalan tol menggunakan KPBU</li> <li>- Tidak ada lagi kekhususan untuk jalan tol, Tahun ini diharmonisasi spesifikasi jalan (menggabungkan jalan biasa dan jalan tol)</li> <li>- Untuk perencanaan penanganan longsor/lereng masuk dimana?</li> </ul> <p>Pak Poltak: Untuk jalan dan jembatan yang memang perlu penanganan longsor bisa diberikan kondisional dimana dibutuhkan penambahan tenaga ahli khusus untuk perencanaan longsor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan jumlah pengalaman di Pedoman Bina Marga disebutkan minimal spesifik X tahun, karena melihat di lapangan memang rata – rata jumlah pengalamannya X tahun tersebut, dan melihat juga ketersediaan Tenaga Ahlinya di lapangan, dan PPK umumnya mencari yang minimal</li> </ul> <p>Pak Poltak: Kalau dibentuk range maksudnya untuk mengurangi pemborosan</p> <p>Bu Eka: Di pedoman Bina Marga hanya menuliskan minimal, kalau di SE ini kita atur range, ngga menyalahi aturan Bina Marga tapi jadi membatasi maksimalnya</p>
8.	<b>Bu Nusa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuat gambar <i>life cycle project</i> tiap tiap lingkup sehingga masing masing lingkup terlihat di gambar (terkait definisi perancangan)</li> </ul>
	<b>Kesimpulan dan Tindak Lanjut</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu didiskusikan lagi terminologi perancangan dan penyesuaian terhadap terminologi – terminologi di UNOR</li> <li>- Menunggu usulan dari Bina Marga terkait lingkup pekerjaan disesuaikan dengan jenis konstruksinya</li> <li>- Untuk range jumlah tahun pengalaman, batas bawah menggunakan acuan dari SE dirjen bina marga, dan batas atas menjadi batas untuk penyeragaman biaya</li> </ul>

## B. Dokumentasi

